

**SKRIPSI**

**STRATEGI DINAS KOPERASI UKM DAN  
PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI  
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI KOTA  
BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI  
NIM. 170602210**

**PROGRAM STUDI S1 EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M / 1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizki  
NIM : 170602210  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



  
Muhammad Rizki

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dalam  
Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh**

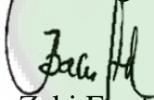
Disusun Oleh :

Muhammad Rizki

170602210

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

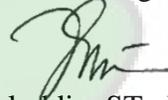
Pembimbing I



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 196403141992031003

Pembimbing II



Jalaluddin, ST., MA

NIDN. 2030126502

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh

Muhammad Rizki

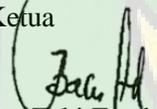
NIM: 170602210

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah

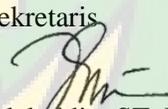
Pada Hari/Tanggal: Kamis 06 Januari 2022 M  
03 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP.196403141992031003

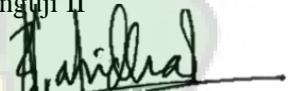
Sekretaris

  
Jalaluddin, ST. MA  
NIDN: 2030126502

Penguji I

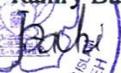
  
Dr. Hendra Syahputra, MM  
NIP. 1976102420090110055

Penguji II

  
Hafidhan, S.E., M.Si., Ak, CA  
NIP. 197204282005011033

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

---

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Rizki  
NIM : 170602210  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
E-mail : [170602210@student.ar-raniry.ac.id](mailto:170602210@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

Yang berjudul:

**“Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh”.**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Mengetahui,

Penulis

Muhammad Rizki  
NIM: 170602210

Pembimbing I

Dr. Zaki Huad, M.Ag  
NIP: 196403141992031003

Pembimbing II

Jalaluddin, ST. MA  
NIDN: 2030126502

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, serta pertolongan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Dalam Pengembangan KSPPS Syariah Di Kota Banda Aceh”** serta tak lupa pula shalawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad ﷺ, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Penulisan proposal ilmiah ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S-1 Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyelesaian proposal ini, penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan materi, doa, dukungan dan sumbangsih pemikirannya dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Zaki Fuad., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam berbagai pengurusan administrasi selama penulisan proposal ilmiah ini.
2. Dr. Nilam Sari, M. Ag. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari’ah.
3. Muhammad Arifin, Ph. D. selaku Ketua Laboratorium FEBI UIN Ar-

Raniry.

4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Jalaluddin, ST., MA selaku dosen pembimbing I dan II skripsi selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan motivasi, serta pengalamannya. Terima kasih telah membimbing sampai skripsi ini selesai dan sah untuk memenuhi persyaratan kelulusan kuliah saya. Semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
5. Dr. Hendra Syahputra, MM dan Hafidhah, S.E., M.Si., Ak, CA selaku dosen penguji I dan II skripsi ini, membagikan ilmu, dan motivasi, serta pengalamannya. Terima kasih telah membimbing sampai skripsi ini selesai dan sah untuk memenuhi persyaratan kelulusan kuliah saya. Semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Hafiizh Maulana, SP., S. HL., ME selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata I Ekonomi Syari'ah, juga yang telah menyetujui judul dan memberi masukan beserta bimbingan disaat kesulitan dalam proses penulisan proposal ilmiah ini, juga kepada seluruh dosen dan staf akademik Prodi Ekonomi Syari'ah.
7. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Terima kasih telah bersedia memberi saya data dan mewawancarai
8. Orang tua tercinta Bapak Mukhlis dan Bunda Cut Aja Safrida atas setiap cinta, kasih sayang, do'a dan dukungan, baik secara moral maupun materil, baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua kasih sayangmu.
9. Segenap sahabatku tercinta yaitu sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat, baik buah pikiran dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

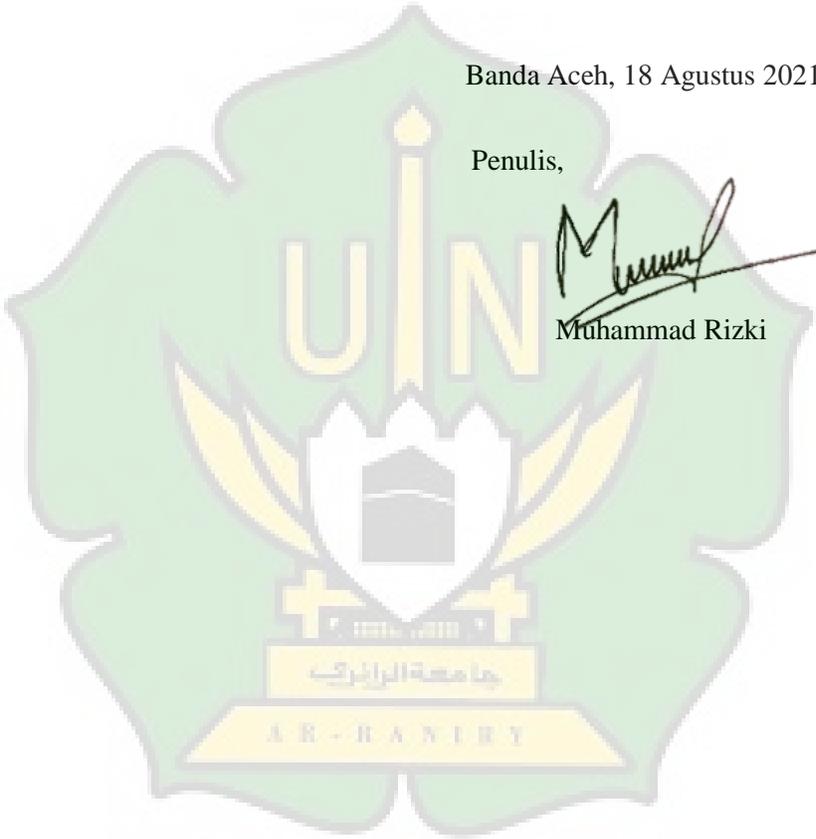
Akhirnya atas segala do'a, bantuan, dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga amal kebaikan saudara sekalian mendapatkan balasandari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Banda Aceh, 18 Agustus 2021

Penulis,



Muhammad Rizki



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

**1. Konsonan**

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haulā* : هول

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

*qāla* : قَالَ

*ramā* : رَمَى

*qīla* : قِيلَ

*yaqūlu* : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*raudah al-atfāl/ raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah/* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

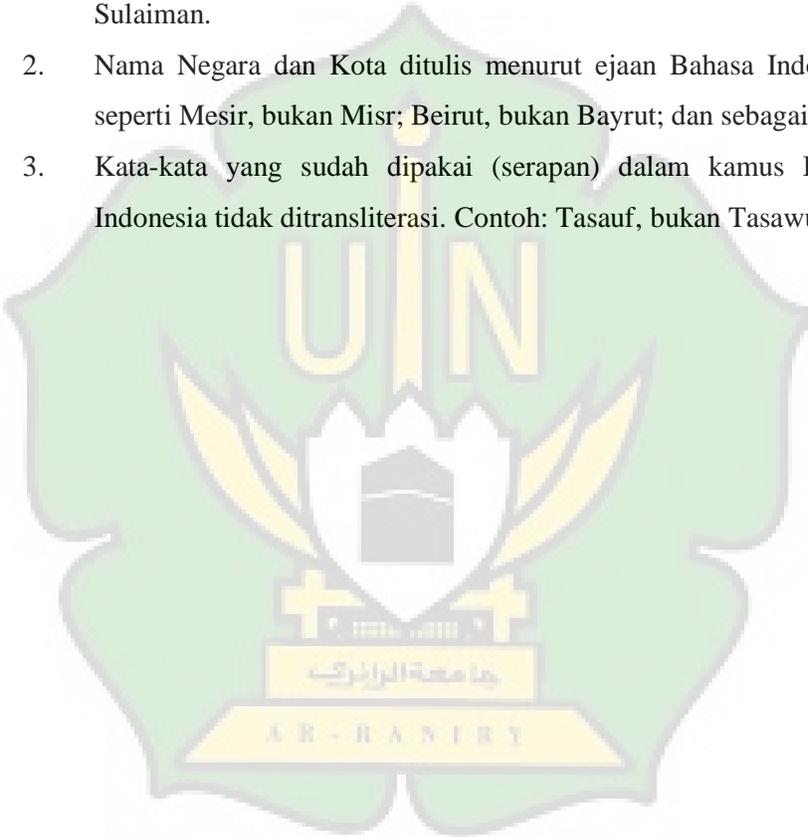
*al-Madīnatul Munawwarah*

*Ṭalḥah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizki  
NIM : 170602210  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Strategi Dinas UKM dan Perdagangan dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Jalaluddin, ST., MA

Di Indonesia kehadiran KSPPS Syariah (KSPPS) sangat membantu akan peningkatan ekonomi nasional maupun masyarakat, tentu saja setiap lembaga yang hadir di masyarakat pasti memiliki masalah-malasan baik dari internal maupun eksternal ,untuk mengatasi permasalahan dalam KSPPS dibutuhkan suatu lembaga yang membantu mengembangkan, mengawasi, membina, dan memajukan KSPPS, sehingga KSPPS dapat berkembang dengan bagus. Lembaga itu adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk merespon bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan perdagangan dalam pengembangan KSPPS yang ada di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tanpa adanya suatu uji hubungan variabel dari orang-orang atau perilaku yang diamati, Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini adalah Strategi yang dijalankan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan cukup bagus dari segi kuantitas tapi dari segi kualitas perlu ditingkatkan lagi demi majunya KSPPS syariah di kota Banda Aceh

Kata Kunci : ***Strategi, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, KSPPS Syariah***

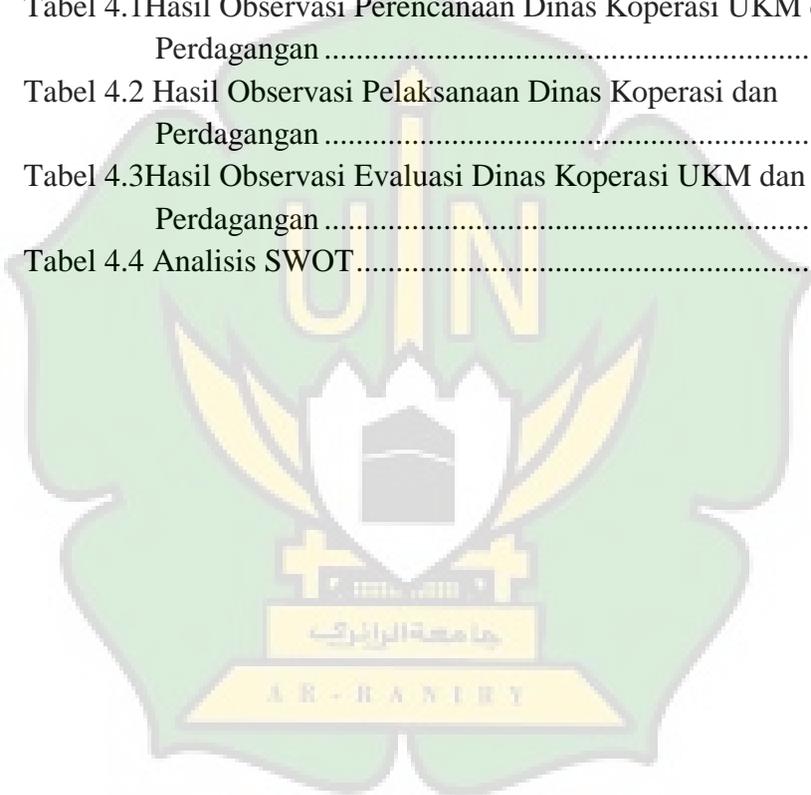
## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Manajemen Strategi .....	12
2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Strategi .....	12
2.1.2 Tahapan Manajemen Strategi .....	13
2.1.3 Perencanaan Strategi .....	15
2.1.4 Pelaksanaan Strategi .....	18
2.1.5 Evaluasi Strategi.....	21
2.1.6 Analisis SWOT .....	21
2.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah .....	23
2.2.1 Pengertian Koperasi .....	23
2.2.2 Tujuan Koperasi .....	24
2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi .....	25

2.2.4 Peran dan Fungsi Koperasi .....	25
2.2.5 Pengawasan Koperasi Syariah .....	26
2.3 Penelitian Terdahulu .....	27
2.4 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
3.2 Lokasi Penelitian .....	36
3.3 Data dan Sumber .....	36
3.3.1 Data Primer .....	36
3.3.2 Data Sekunder .....	37
3.4 Teknik Pengumpulan .....	37
3.5 Teknik Analisis .....	39
3.6 Tahapan Penelitian .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Profil Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh .....	43
4.1.1 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan .....	45
4.2 Hasil Penelitian .....	64
4.2.1 Perencanaan dan Pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dalam Pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh .....	64
4.2.2 Evaluasi Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh .....	77
4.2.3 Analisis SWOT .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Kota Banda Aceh Tahun 2021 .....	3
Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Koperasi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021 .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 4.1 Hasil Observasi Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan .....	70
Tabel 4.2 Hasil Observasi Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Perdagangan .....	76
Tabel 4.3 Hasil Observasi Evaluasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan .....	80
Tabel 4.4 Analisis SWOT.....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran.....	33
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing.....	95
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	96
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup .....	98



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berkembangnya perekonomian masyarakat sekarang ini, tidak terlepas dari banyaknya lembaga keuangan yang bermunculan. Lembaga keuangan ada yang bank maupun lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank telah banyak mengalami perkembangan, baik itu dari sisi produk atau jasa dari bank yang ditawarkan kepada masyarakat. Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, jika dilihat dari praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa berperan aktif. Baitul mal wa tamwil dan koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah sebagai lembaga keuangan mikro berperan sangat penting dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Karena lembaga-lembaga tersebut langsung bersentuhan dengan industri mikro yang dijalankan oleh masyarakat luas (www.bi.go.id 2015).

Adapun prinsip-prinsip dalam Islam yaitu:, prinsip kebolehan, prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip pertanggung jawaban, prinsip kehendak bebas prinsip kebenaran, prinsip kemanfaatan prinsip kerelaan, dan prinsip haramnya riba. Dengan sistem bagi hasil yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah mampu merubah sikap perilaku masyarakat untuk menerima ide-ide baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah tersebut.

Dalam ekonomi Islam segala kegiatannya selalu memberikan yang terbaik bagi semua pihak (Katsir, 2015).

Baitul Mal Wattamwil dengan legalitas koperasi syariah merupakan lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan sosial, maupun ekonomi, semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjalankan lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Di Indonesia Ekonomi masyarakat daerah maupun masyarakat nasional, sangat membantu dengan kehadiran KSPPS Syariah (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dimana kehadiran KSPPS bertujuan memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang investasi, simpanan, dan pembiayaan, sesuai pola syariah(bagi hasil) (Burhanuddin, 2013). Kegiatan KSPPS Syariah adalah berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Keadilan adalah titik tolaknya, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Ini berarti bahwa nilai keadilan itu penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi. KSPPS Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul

Maal Wattamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia (Deputi,2016).

Di Indonesia Perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik meskipun jumlahnya masih minim. Saat ini jumlah unit koperasi mencapai 150.223 unit usaha dan jumlah tersebut 1,5 persennya merupakan KSPPS syariah (KSPPS). Jumlah KSPPS tercatat sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal dari dalam mencapai RP 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2 triliun ( Goukm.id, 2019).

**Tabel 1.1 Jumlah Koperasi di Kota Banda Aceh Tahun 2021**

NO	JENIS KOPERASI	AKTIF	TIDAK AKTIF	JUMLAH
1	KUD	3	3	6
2	KOP. PETERNAKAN	1	0	1
3	KOP. NELAYAN	6	3	9
4	KOPINKRA	1	0	1
5	KOPPONTREN	6	1	7
6	KOPKAR	33	17	50
7	KOP. AD	17	1	18
8	KOP. POLISI	2	3	5
9	KOP. SERBA USAHA	39	22	61
10	KOP. PASAR	1	1	2
11	KOP.SIMPANPINJAM	5	0	5
12	KOP. PEGAWAI NEGERI	124	14	138
13	KOP. WANITA	35	19	54
14	KOP. WEDRATAMA	1	0	1

15	KOP. PEPABRI	1	0	1
16	KOP. MAHASISWA	1	1	2
17	KOP. PEMUDA	1	2	3
18	KOP. LAINNYA	107	34	141
19	KJKS	1	0	1
20	KOP. SEKUNDER	1	0	1
<b>JUMLAH</b>		386	121	507

Mengatasi permasalahan dalam KSPPS dibutuhkan suatu lembaga yang membantu mengawasi, mengembangkan, memajukan, dan membina, KSPPS, sehingga KSPPS dapat berkembang dengan bagus.

Lembaga itu adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Dimana Dinas tersebut berperan dalam pengembangan koperasi melalui kelembagaan, sehingga para pelaku KSPPS dapat memberi kemaslahatan Bersama bagi masyarakat, sehingga mereka dapat hidup mandiri dengan usahanya dan semakin berkembang kedepannya. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk mengawasi bagaimana keadaan koperasi-koperasi di Kota Banda Aceh. Dan juga bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Dinas KoperasiUKMdanPerdagangan(<http://diskopukmdag.bandaaceh.go.id> 2017).

Perkembangan antara koperasi konvensional dan syariah hampir sama di Kota Banda Aceh. Dalam koperasi syariah disitu ada

semacam DPS, dalam koperasi ada perangkat organisasi yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, dan pengawas. Untuk koperasi syariah harus dilengkapi dengan DPS. Kota Banda Aceh perkembangan hampir sama antara koperasi konvensional dan syariah, cuma akhir-akhir ini kecenderungannya lebih kepada syariah karena pemerintah telah mengeluarkan Qanun LKS No 11 tahun 2018 yaitu berisi setiap Lembaga keuangan konvensional wajib beralih ke Lembaga keuangan Syariah.

Menurut Aminullah setelah keluarnya qanun LKS no 11 tahun 2018, setiap lembaga keuangan konvensional wajib beralih ke lembaga keuangan syariah, termasuk juga koperasi. Oleh karena itu, bagi koperasi yang belum syariah harus segera beralih ke koperasi syariah sebelum 4 Januari 2022 ucap ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh ini.

Tahun 2020 data koperasi di Kota Banda Aceh sebanyak 507 koperasi, dari jumlah tersebut tidak semuanya berjalan aktif, ada juga yang sudah tidak aktif. Sampai dengan triwulan kedua tahun 2020 jumlah koperasi aktif yaitu berjumlah 387 kop atau 75 % dan sisanya tidak aktif. Dari jumlah tersebut Hingga saat ini 25 % dari jumlah Koperasi Aktif telah beralih dari Pola Konvensional ke Pola Syariah dan sisanya akan kita lakukan upaya peralihan di tahun 2021 mengingat batas akhir sesuai dengan qanun tersebut adalah pada januari tahun 2022.

**Tabel 1.2 Data Pertumbuhan Koperasi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021**

Tahun	Jumlah Koperasi
2017	<b>500</b>
2018	<b>502</b>
2019	<b>506</b>
2020	<b>507</b>
2021	<b>507</b>

Nurdin juga mengatakan, ada beberapa kendala dalam melaksanakan masa peralihan dari koperasi konvensional ke koperasi syariah. Pertama kita harus akui bahwa Pemahaman SDM Pengurus dan anggota Koperasi tentang Pola Syariah masih rendah sehingga muncul keragu-raguan baik di tingkat pengurus maupun di tingkat anggota untuk menjalankan pola syariah tersebut. Kedua rendahnya kemampuan SDM Pengurus dalam mengurus dan melengkapi administrasi peralihan dimaksud.

ketiga yaitu sosialisasi yang selama ini dilakukan juga belum diterima oleh seluruh pengurus dan anggota koperasi sehingga masih ada pengurus koperasi yang belum mengetahui bahwa pada Januari 2022 bagi koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam harus sudah beralih dari pola konvensional ke pola syariah.

Namun, untuk menghadapi kendala-kendala tersebut kita terus melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung proses peralihan tersebut, sebagai salah satu upaya yang telah kita lakukan yaitu menyampaikan permohonan kepada Kemenkop dan UKM R.I sebagai Pemerintah atasan dalam urusan perkoperasian untuk mendukung upaya yang sedang kami lakukan (Banda Aceh Jurnalis, 2021).

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan bertugas untuk memantau perkembangan koperasi-koperasi yang ada di kota Banda Aceh . Dengan masing-masing koperasi yang mempunyai perkembangan yang berbeda-beda pada setiap koperasinya. Banyak koperasi yang perkembangannya masih kurang. Ada juga koperasi yang perkembangannya menurun dan SHU-nya juga menurun. Itu juga merupakan salah satu pekerjaan bagian koperasi di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan agar koperasi tersebut mampu berkembang secara baik. Untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan ataupun sosialisasi dengan pengurus-pengurus koperasi agar koperasi syariah yang ada di Kota Banda Aceh lebih berkembang. Dalam bisnis diharapkan suatu perkembangan yang terus naik ke depannya seperti yang dikutip oleh Djakfar Muhammad, pengembangan bisnis yang memerlukan modal dalam Islam harus berorientasi syariah, sebagai pengendali agar bisnis itu tetap dijalur yang benar sesuai ajaran Islam. Dengan kendali syariat, aktifitas bisnis diharapkan dapat mencapai dua hal

utama yaitu target hasil profit materi dan benefit non materi dan pertumbuhannya secara terus menerus.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mengetahui lebih jauh mengenai strategi pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh, peneliti bermaksud membuat penelitian ilmiah yang akan dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan dan pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam upaya pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana evaluasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam upaya pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perencanaan dan pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam upaya pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh.

2. Untuk mendeskripsikan evaluasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam upaya pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis adalah diharapkan mampu menambah pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan strategi dalam pengembangan KSPPS.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi pihak akademis perguruan tinggi**

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika Uin Ar-raniry.

###### **b. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**

Sebagai input masukan tentang strategi-strategi dalam pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh.

###### **c. KSPPS di Kota Banda Aceh**

Sebagai pengetahuan dan wawasan tentang upaya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam upaya mengembangkan KSPPS di Kota Banda Aceh.

###### **d. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini penulisannya ada 5 bab untuk menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis antara pembahasan yang satu dengan yang lain maka setiap bab terdiri dari sub-subnya sebagai perinciannya, dan serta agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapat gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka perlu penulisan skripsi yang benar-benar mengarah pada bagian pembahasan. Maka dari itu kiranya bagi penulis untuk membuat sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari: latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan/manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini terdiri dari: strategi, KSPPS Syariah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian dan peneliti akan mewawancarai staf-staf pada bidang Koperasi di Dinas

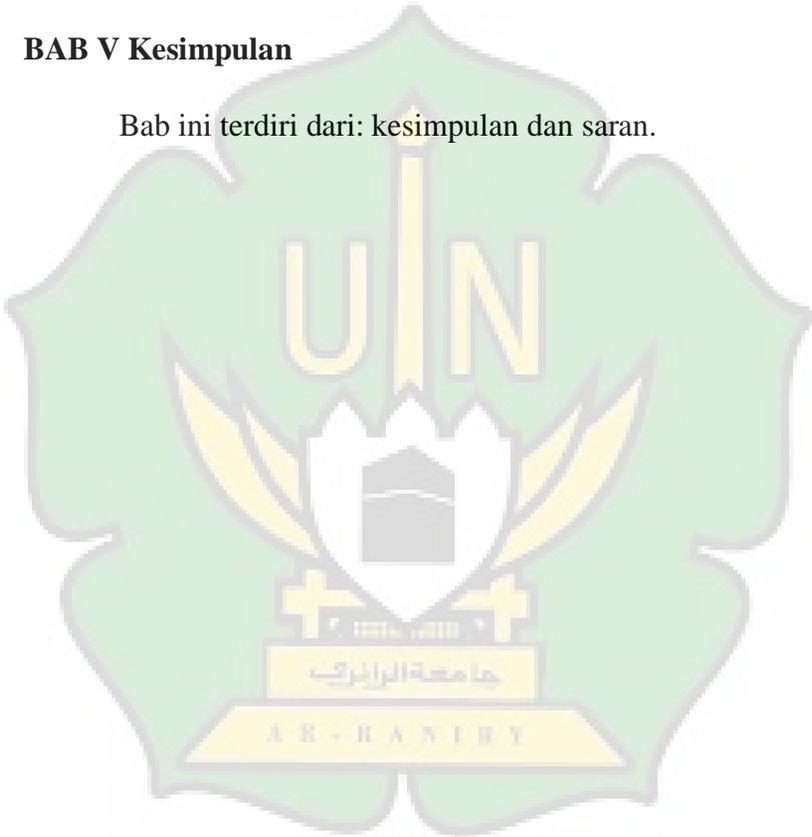
Koperasi UKM dan Perdagangan serta memakai metode analisis SWOT

#### **BAB IV Hasil Penelitian**

Bab ini terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

#### **BAB V Kesimpulan**

Bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Manajemen Strategi**

##### **2.1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Strategi**

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos=militer dan ag=memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Strategi adalah arah dan ruang lingkup sebuah organisasi untuk mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber daya dalam jangka Panjang dan dalam lingkungan yang menantang, untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi harapan pemangku kepentingan (Johnson 2016).

Menurut David sebagaimana yang dikutip oleh Taufiqurokhman, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut David manajemen strategi dapat di definisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya (Taufiqurokhman, 2016).

### **2.1.2 Tahapan Manajemen Strategi**

Menurut David sebagaimana yang dikutip oleh Taufiqurokhman tahapan dalam manajemen Strategi ada 4 (empat), yaitu:

- a. Perumusan strategi; mengembangkan visi dan misi, untuk menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, Strategi - isu formulasi termasuk memutuskan bisnis apa yang baru masuk, dan bisnis apa yang harus ditinggalkan, apakah akan bergabung atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana untuk menghindari pengambil alihan supaya menghindari permusuhan (David 2015).
- b. Pelaksanaan strategis Memerlukan suatu organisasi untuk membangun objectives tahunan, menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan memotivasi karyawan, sehingga strategi yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan strategi termasuk mengembangkan strategi yang mendukung, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi (David 2015).

- c. Evaluasi Strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu jika salah satu strategi tidak bekerja dengan baik, evaluasi strategi adalah sarana yang paling diutamakan untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi adalah subjek perbaikan masa depan karena faktor dari luar dan dari dalam perusahaan terus berubah.

Terdapat tiga kegiatan evaluasi strategi fundamental yaitu (David 2015):

1. Meninjau faktor dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) yang dasar untuk strategi saat ini.
2. Mengukur kemampuan pekerjaan.
3. Mengambil tindakan korektif.

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan agar strategi dapat diimplementasikan secara efektif, (Sofjan 2016) yaitu:14

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain
- b. Menghubungkan atau mengaitkan keunggulan atau kekuatan organisasi dengan peluang dari lingkungannya
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang di dapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru

- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu

### **2.1.3 Perencanaan Strategi**

Menurut Stoner dan Wankel sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn memperkenalkan istilah (strategic planning) sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang (Ahmad, 2012).

Formulasi strategis atau yang biasanya disebut proses penyusunan perencanaan jangka panjang. Jadi di dalam perencanaan strategis ini pembelajaran baik di tingkat korporat maupun di tingkat bisnis sangat dibutuhkan. penyusunan strategi yang sesuai dengan visi misi adalah tujuan , sasaran serta kebijakan perusahaan (Freddy, 2015).

Berikut penjelasan strategi tingkat korporat, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional:

## **a. Strategi di Tingkat Korporat**

Strategi korporat adalah strategi yang disusun dalam suatu bisnis, dimana perusahaan akan bersaing dengan cara mengubah distinctive competence menjadi competitive advantage. Sementara, menurut Michael Porter menyarankan bahwa dalam penyusunan strategi korporat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu keunggulan bersaing yang dimiliki, atau yang akan diciptakan, dan menempatkannya pada masing-masing unit bisnis (Freedy, 2015).

Dalam literatur manajemen strategi, para peneliti mencoba mendefinisikan strategi korporat sebagai (Mudrajad 2015):

1. Strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut.
2. Suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya.

Kesimpulannya adalah penyusunan strategi-strategi di tingkat yang lebih rendah (strategi unit bisnis dan strategi fungsional) mengambil landasan dan acuan pada tingkat korporat. Dengan demikian, strategi yang telah disusun di ketiga tingkatan strategi (korporat, unit bisnis, dan fungsional) merupakan strategi yang saling mendukung dan terkait untuk menciptakan sinergi bagi kinerja perusahaan.

## **b. Strategi Bisnis**

Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis umumnya menekankan pada peningkatan laba produksi dan penjualan (Husein, 2013).

Strategi bisnis adalah strategi mencapai tujuan yang sering dianalogikan dengan strategi catur, yang dimana sistematika berfikir, penyusunan rencana, kesigapan melangkah, keberanian mengambil resiko dan gairah untuk memenangkan pertandingan merupakan beberapa karakteristik permainan catur yang relevan dengan praktek pengelolaan bisnis (Joewono 2012).

## **c. Strategi Fungsional**

Strategi fungsional ini lebih bersifat operasional karena akan langsung diimplementasikan oleh fungsi-fungsi manajemen yang ada di bawah tanggung jawabnya, seperti fungsi manajemen produksi/operasional, fungsi manajemen pemasaran, fungsi manajemen keuangan, dan fungsi manajemen sumber daya manusia.

Strategi tingkat fungsional mempunyai lingkup yang lebih sempit lagi dibandingkan strategi korporasi dan strategi bisnis. Berhubungan dengan fungsi bisnis seperti fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi keuangan, fungsi riset, dan pengembangan (R&D). Strategi fungsional harus mengarah

kepada strategi bisnis dan konsep mereka yang paling utama adalah tergantung kepada hasil jawaban bagaimana cara menerapkannya (wheelen, 2008)

Strategi yang terjadi di level fungsional seperti, operasional, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Riset dan pengembangan dimana strategi ini akan meningkatkan area fungsional perusahaan sehingga mendapat keunggulan bersaing.

Strategi ini harus mengacu pada strategi bisnis dan strategi korporasi. Memfokuskan pada memaksimalkan produktivitas sumber daya yang digunakan dalam memberikan value terbaik untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan (customer). Strategi fungsional sering juga disebut Value-based-strategy (David, 2008)

#### **2.1.4 Pelaksanaan Strategi**

Pelaksanaan strategi adalah aktivitas pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. pelaksanaan strategi merupakan tindakan yang di proses melalui beberapa strategi, kebijakan dan juga melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Implementasi strategi juga dapat diartikan sebagai pengembangan strategi dalam bentuk tindakan.

Tahap mengimplementasikan strategi ini perusahaan menetapkan tujuan atau sasaran perusahaan tahunan, menyusun kebijaksanaan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya manusia agar strategi yang telah disusun bisa dijalankan. Implementasi strategi ini meliputi budaya yang mendukung

pengembangan perusahaan, menyiapkan anggaran, memanfaatkan sistem informasi, memotivasi sumber daya manusia supaya mau menjalankan dan bekerja sebaik mungkin. Implementasi strategi membutuhkan disiplin dan kinerja yang tinggi serta imbalan jasa yang mencukupi. (Taufiqurokhman, 2016)

Pelaksanaan manajemen strategi ditentukan oleh adanya identifikasi lingkungan (internal dan eksternal), perumusan strategi, pelaksanaan strategi, pengawasan, dan evaluasi strategi. (Taufiqurokhman, 2016) Hal tersebut disusun dari sistem lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan: sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dikenal sebagai SWOT ataupun pendekatan peran (policy), strategi, dan fungsi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara luas maupun spesifik, seperti:

- a. Adanya pelaku baru dalam ekonomi, diferensiasi barang, modal, biaya pemasok, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah, dan lainnya.
- b. Adanya produk pengganti (biaya/harga)
- c. Kekuasaan tawar menawar pemasok (dominasi, integrasi, dan keunikan)
- d. Kekuasaan tawar menawar pembeli (kuantitas, mutu, dan ketersediaan)

- e. Adanya persaingan di antara pesaing (posisi dan ketergantungan)

Keberadaan manajemen strategi tidak untuk menjelaskan tujuan, sebaliknya tujuan dan sasaran harus dipengaruhi oleh peluang yang tersedia, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam usaha pencapaian tujuan dalam perencanaan manajemen strategi (Taufiqurokhman, 2016) antara lain:

- a. jika hasil yang dicapai seperti yang diinginkan maka manajemen strategi disebut efektif dan efisien
- b. Keputusan dan pelaksanaan : keputusan manajemen strategi tidak berarti apa-apa tanpa implementasi. Strategi tergantung pada kemungkinan dan taktik yang potensial. tujuan adalah acuan dalam pengambilan Keputusan strategi
- c. Pertumbuhan dan struktur organisasi: penyusunan struktur organisasi adalah tahap pelaksanaan strategi yang harus dipertimbangkan karena keselarasan struktur dengan strategi merupakan hal yang penting untuk tercapainya pelaksanaan strategi. Pertumbuhan organisasi terjadi pada skala organisasi berkembang. Untuk menghasilkan Pertumbuhan dalam organisasi perlu berbagai bentuk struktur organisasi seperti struktur fungsional, divisonal geografis, organisasi unit bisnis, organisasi matrik, dan struktur organisasi horizontal.

### **2.1.5 Evaluasi Strategi**

Tahapan akhir dalam manajemen strategi adalah evaluasi dan pengawasan. semua strategi adalah subjek perbaikan di masa yang akan datang, sebab berbagai faktor baik dari luar maupun dari dalam akan terus mengalami perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu. yang harus ada dalam Evaluasi strategi (Taufiqurokhman, 2016) adalah :

1. kejelasan komponen eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan.
2. Mengukur implementasi yang sudah dijalankan
3. Memutuskan suatu langkah perbaikan apabila terjadi ketidaklarasan dalam penerapan strategi.

Yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk meraih kesuksesan adalah evaluasi strategi karena dengan evaluasi akan memperbaiki strategi-strategi yang tidak sesuai dengan perencanaan kesuksesan usaha yang akan diraih di masa mendatang.

### **2.1.6 Analisis SWOT**

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, analisis SWOT diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Philip, 2009). SWOT adalah singkatan dari bahasa Inggris strengths (kekuatan), weaknesses (kelemahan), opportunity (Peluang), dan threats (ancaman). Analisis SWOT berguna untuk menganalisis faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau

salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal (Ismanto, 2009).

Dalam penerapan analisis SWOT pada lembaga keuangan syariah dapat dibagi dalam lima Langkah (Ismanto, 2009) sebagai berikut:

- a. Menyiapkan sesi SWOT
- b. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
- c. Mengidentifikasi kesempatan dan ancaman
- d. Melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan
- e. Menganalisis kekuatan dan kelemahan

Didalam tubuh suatu organisasi termasuk dalam satuan bisnis tentu adanya faktor-faktor kekuatan dan kelemahan tertentu sedangkan faktor-faktor lingkungan yaitu peluang dan ancaman merupakan yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan atau satuan bisnis yang bersangkutan. Didalam analisis SWOT terdapat instrument yang paling ampuh dalam melakukan analisis strategi, kemampuan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi. Biasanya upaya untuk memilih dan menentukan strategi yang efektif membuahkan hasil yang diharapkan jika para penentu strategi perusahaan mampu melakukan kedua hal tersebut dengan tepat,.

## **2.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

### **2.2.1 Pengertian Koperasi**

Istilah koperasi berasal dari kata (co=bersama, operation=usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Badan usaha koperasi selain bergerak di bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa, juga dapat bergerak di bidang jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Menurut Burhanuddin, Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Burhanuddin , 2013).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salaam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. BMT sesuai namanya terdiri atas dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Baitul tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil,

antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

- b. Baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan

dan amanahnya. BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis

### **2.2.2 Tujuan Koperasi**

Tujuan umum koperasi merupakan menaikkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. yang menjadi tujuan pengembangan koperasi menurut prinsip-prinsip syariah (Burhanuddin, 2013) merupakan:

- a. Khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yaitu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi melalui sistem syariah
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya perekonomian Indonesia secara keseluruhan
- c. Meningkatkan semangat dan partisipasi anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berdasarkan hukum Syariah.

tujuan pendirian koperasi simpan pinjam atau pembentukan unit simpan pinjam pada koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, yang pada akhir periode kerja

pencapaian tujuan tersebut harus ditampilkan pada bentuk laporan promosi ekonomi anggota, oleh karena itu tujuan yang sudah dirumuskan harus dapat diterjemahkan ke dalam ukuran kuantitatif dan dapat diukur dengan satuan uang (Subagyo 2014)

### **2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik (Hendrojogi, 2015), Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka
- b. Pengawasan demokratis oleh anggota
- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- d. Otonomi dan kemandirian
- e. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan
- f. Kerjasama antar koperasi
- g. Kepedulian antar masyarakat

### **2.2.4 Peran dan Fungsi Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan usaha atas dasar asas-asas tertentu, menjadi acuan bagi pergerakan ekonomi rakyat, dan atas dasar keanggotaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi (Burhanuddin, 2013) adalah

- a. Membina dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, terutama seluruh lapisan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai penyokong.
- d. Upaya mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional merupakan upaya bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan ekonomi serta demokrasi

#### **2.2.5 Pengawasan Koperasi Syariah**

Salah satu organ koperasi merupakan adanya fungsi supervisi pada struktur organisasinya. Pengawasan bisa dilakukan baik dalam aspek manajemen juga kepatuhan terhadap prinsip syariah yg dijalankan koperasi. Adapun tujuan supervisi koperasi jasa keuangan Syariah (Burhanuddin, 2013) merupakan menjadi berikut :

- a. Mengendalikan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Unit Jasa Keuangan Syariah supaya bisa menjalankan bisnis sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku
- b. Meningkatkan gambaran dan dapat dipercaya koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan koperasi syariah

menjadi forum keuangan yg bisa mengelola dana anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya sinkron menggunakan prinsip koperasi.

- c. Menjaga dan melindungi aset Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Unit Layanan Keuangan Syariah berdasarkan penyelewengan sang pihak yg nir bertanggung jawab. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi terhadap pihak-pihak yg berkepentingan.
- d. Mendorong pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariaih koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu menaikkan pemberdayaan ekonomi anggota.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rina Febrinova, jurnal "Kinerja Keuangan dan Strategi Pengembangan Usaha Koperasi (KUD) Usaha Maju Desa	Metode yang di gunakan ada dua yaitu analisis rasio keuangan dan analisis SWOT Dalam penelitian ini	dalam strategi pengembangan koperasi yang pertama meningkatkan kemampuan pengurus KUD melalui pelatihan-pelatihan,	sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan koperasi dan menggunakan analisis SWOT	meneliti tentang kinerja keuangan sedangkan peneliti tentang pengembangan Koperasi Syariah.

<p>Karya Bhakti Kecamatan Kiri) "Program Studi Agribisnis Universitas Pasir Pengairan</p>	<p>pengambilan keputusan strategi pengembangan suatu usaha dilakukan suatu analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) yang bersamaan dengan mengurangi kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).</p>	<p>kedua meningkatkan pelayanan, ketiga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat memperluas pangsa pasar diluar wilayah koperasi, keempat melakukan inovasi, dan kelima memiliki wirakoperasi yang handal dan memiliki keahlian serta kemampuan teknis.</p>		
---	---	--	--	--

2.	Imam Suhartono, jurnal "Strategi Pengembangan Koperasi Berorientasi Bisnis", STIE AMA Salatiga	Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi untuk mengembangkan koperasi. penelitian ini adalah kualitatif.	program unggulan yang dikembangkan sebagai ujung tombak untuk mempercepat pengembangan koperasi dilakukan melalui pengembangan kemitraan usaha serta melalui gerakan kewirausahaan	sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan koperasi	tentang strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis sedangkan penelitian peneliti tentang strategi pengembangan Koperasi Syariah
3.	Vani Sintiya Dewi, Jurnal "Kinerja, Kesejahteraan Anggota, dan Strategi Pengembangan Koperasi", Universitas Lampung, 2016	penelitian ini adalah tentang kinerja dan tingkat kesejahteraan KUD MS dan KUDD TTSW, serta alternatif strategi apa yang tepat bagi pengemba	kinerja kedua koperasi berdasarkan pedoman pemeringkatan koperasi kementerian Negara koperasi dan UMKM RI tahun 2007. KUD MS memiliki kualifikasi berkualitas sedangkan	sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan koperasi.	tentang kinerja, tingkat kesejahteraan, serta alternatif strategi yang tepat bagi pengembangan koperasi sedangkan penelitian peneliti tentang strategi pengembang

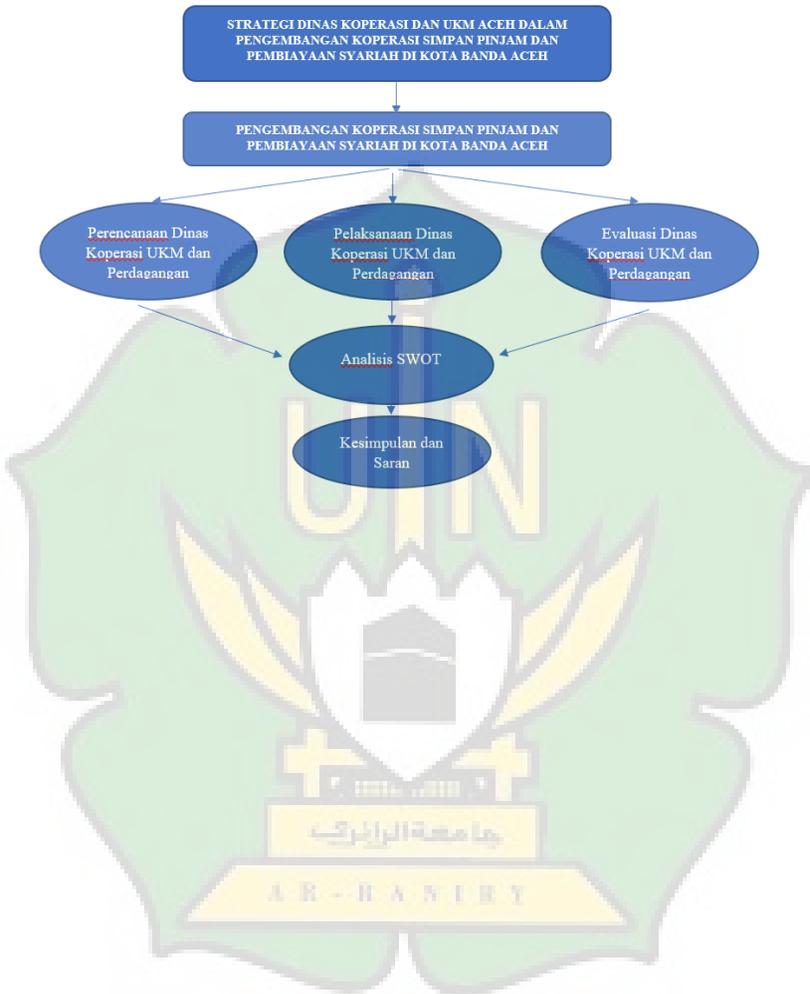
		ngan KUD TTSW	KUD TTSW memiliki kualifikasi cukup berkualitas. Untuk kesejahteraan anggotanya KUD MS lebih baik dibandingkan dengan anggota KUD TTSW		an Koperasi Syariah
4.	Pristiyanto, dkk. Jurnal “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang” Institut Pertanian Bogor, 2013	strategi untuk meningkatkan pengembangan usaha yang dimiliki KJKS. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menunjukkan posisi koperasi dan peluangnya dalam pengemba	KJKS BMT Mardlotillah telah mampu mengembangkan usahanya. KJKS BMT Mardlotillah pada strategi pengembangan dan pembangunan yang dihasilkan dari matriks SWOT dan pembobotan dari matriks QSP diperoleh 12 prioritas strategi yang disarankan.	sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan koperasi	strategi pengembangannya dalam pembiayaan usaha mikro sedangkan penelitian peneliti tentang strategi pengembangan Koperasi Syariah

		<p>ngan usaha. Serta alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan KJKS dalam pembiayaan usaha mikro.</p>	<p>Alternatif strategi untuk KJKS yaitu: peningkatan mutu layanan dan pengelolaan usaha sesuai syariah, meningkatkan pencitraan koperasi, meningkatkan mutu SDM, menjalin hubungan baik/kemitraan dengan lembaga keuangan/donor, serta optimalisasi pelayanan dan pembinaan anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung anggota.</p>		
5.	Saiful Bahri, Skripsi	strategi, kebijakan, analisis	strategi yang dilakukan oleh Dinas	sama-sama meneliti tentang	dalam penelitian ini bukan hanya

<p>“Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan dalam Pengembangan KJKS”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011</p>	<p>SWOT, dan langkah ke depan dari Dinas Koperasi Kota Tangerang Selatan dalam Pengembangan KJKS.</p>	<p>Koperasi Kota Tangerang Selatan yaitu bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah maupun swasta, seperti perbankan, BUMN, serta BUMS. Selain itu strateginya adalah rencana untuk melakukan sosialisasi, mendata, pelatihan, pembinaan, serta meningkatkan kinerja para pelaku KJKS maupun UKM</p>	<p>perkembangan KSPPS/KJKS dan menggunakan analisis SWOT dalam penelitian</p>	<p>KSPPS/KJKS saja tetapi juga ada UKM penelitian di atas dilakukan di Kota Tangerang.</p>
--	---	--	---	--

## 2.4 Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pentingnya untuk menentukan jenis penelitian sebelum memasuki lapangan, karena jenis penelitian merupakan dasar utama untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat, karena akan mempengaruhi keseluruhan penelitian. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. (Samiaji, 2012) Menurut Sugiyono Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan tentatif, dan mereka berkembang atau berubah setelah peneliti memasuki lapangan. (Imam, 2015) Dalam penelitian kualitatif, ada tiga kemungkinan peneliti mengkaji masalah, yaitu (1) Masalah yang dibawa peneliti masih ada, dari awal sampai akhir penelitian sama, sehingga judulnya proposal adalah judul laporan penelitian Konsisten; (2) Masalah yang dibawa oleh peneliti setelah memasuki penelitian dan pengembangan, yaitu masalah yang telah disusun telah diperluas/diperdalam, tanpa terlalu banyak perubahan,

membuat topik penelitian lebih detail; (3) peneliti sudah masuk ke dalam permasalahan yang dibawa domain berubah total, dan permasalahan harus diubah, karena judul proposal berbeda dengan judul penelitian, maka judul diubah .

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Suharsimi, 2010) Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan suatu objek, suatu kondisi atau lingkungan tertentu, guna menggambarkan dan menganalisis masalah dan fenomena yang terjadi secara sistematis. Dengan kata lain, penelitian ini hanya menggambarkan fenomena penelitian, karena berasal dari sumber data berupa tulisan, perilaku lisan, dan lain-lain, dan tidak dilakukan uji hubungan variabel. Dengan begitu, sumber data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktivitas suatu lembaga dan tempat yang menjadi subjek penelitian yang dilakukan adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pengembangan KSPPS Syariah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan . Penentuan lokasi ini dengan alasan bahwa Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina koperasi atau lainnya sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan termasuk juga KSPPS. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah instansi pemerintah yang membina Seluruh KSPPS yang ada di Aceh khususnya di Kota Banda Aceh

### **3.3 Data dan Sumber**

Data Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Lexy j, 2015) Dalam penelitian ini sumber data penelitian ada dua:

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diselidiki. Seperti dikatakan Lexy J. Moleong, bahwa ”kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama”. Data primer yang peneliti butuhkan adalah semua yang ada di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan staf-staf pada bidang Koperasi di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder berasal dari dokumen-dokumen berupa catatan-catatan. Sebagaimana yang dikatakan Moleong bahwa "dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi". (Lexy j, 2015) Data sekunder yang peneliti butuhkan adalah berupa dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh terkait dengan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).

### **3.4 Teknik Pengumpulan**

Data Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknik analisis data, dari hasil pengamatan langsung terdapat perilaku manusia dimana peneliti secara partisipatif berada dalam kelompok yang diselidikinya. Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Tahapan dalam observasi menurut Spradley sebagaimana yang dikutip oleh Imam Gunawan, (Imam, 2015) yaitu: (1) seleksi suatu latar (setting) yaitu dimana dan kapan proses-proses dan individu-individu yang menarik itu dapat di observasi; (2) memberikan definisi tentang apa yang dapat didokumentasikan dalam observasi itu dan dalam setiap kasus; (3) latihan untuk pengamat supaya ada standarisasi, seperti focus-fokus penelitian; (4) observasi deskriptif yang memberikan suatu pemaparan umum mengenai lapangan; (5) observasi terfokus yang semakin terkonsentrasi pada aspek-aspek yang relevan dengan pertanyaan penelitian; (6) observasi selektif yang dimaksudkan untuk secara sengaja menangkap hanya aspek-aspek pokok; (7) akhir dari observasi apabila kepenuhan teori telah tercapai, yaitu apabila observasi lebih lanjut tidak memberikan pengetahuan lanjutan Dengan demikian, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan pengamatan (melihat dan mendengar) dan pencatatan kondisi KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh

## 2. Studi dokumen

Studi dokumen Menurut Renier sebagaimana yang dikutip oleh Imam Gunawan, menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian (1) dalam arti luas, yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan; (2) dalam arti sempit, yaitu meliputi semua sumber tertulis saja; dan (3) dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan suratsurat negara, seperti

surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif dimana sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dengan demikian peneliti membutuhkan dokumen berupa data tentang profil lembaga, struktur organisasi, data tentang (KSPPS), serta data perkembangan KSPPS Syariah (KSPPS)

### **3.5 Teknik Analisis**

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan adanya bukti data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakannya kepada orang lain. (Lexy j, 2015) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan focus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud untuk mengadakan analisis data-data yang diperoleh dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Imam Gunawan mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu

(1) reduksi data; (2) paparan data; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas merangkum, menentukan hal-hal pokok, memfokuskan dalam hal-hal penting, dalam mencari tema dan polanya. Data yg sudah direduksi akan menaruh citra lebih kentara dan memudahkan buat melakukan pengumpulan data

#### 2) Paparan Data

Pemaparan data menjadi sekumpulan fakta tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan konklusi dan pengambilan tindakan. Penyajian data dipakai buat lebih menaikkan pemahaman perkara dan menjadi acuan merogoh tindakan menurut pemahaman dan analisis hidangan data.

#### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan konklusi adalah output penelitian yg menjawab focus penelitian dari output analisis data. Simpulan tersaji pada bentuk naratif objek penelitian menggunakan berpedoman dalam kajian penelitian.

### **3.6 Tahapan Penelitian**

Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, “ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif yaitu: (1) tahap pra lapangan, (2) tahap kegiatan lapangan, (3) tahap

analisis intensif". (Lexy j, 2015) Atas dasar itulah, pada penelitian ini peneliti memakai 3 termin (tahap), yaitu termin orientasi (pra lapangan), termin pengumpulan data (lapangan) atau termin eksplorasi dan termin analisis dan penafsiran data. Ketiga termin tadi bisa dijelaskan menjadi berikut:

BAB I Tahap Pra Lapangan, yaitu mengunjungi dan bertatap muka dengan pegawai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan. Pada termin ini aktivitas yg dilakukan merupakan mohon ijin buat melakukan penelitian, merancang usulan penelitian, memilih informan, menyiapkan kelengkapan penelitian dan mengungkapkan planning penelitian

BAB II Tahap Lapangan, aktivitas yg dilakukan peneliti merupakan mengumpulkan data menggunakan cara (1) wawancara menggunakan subjek dan informan penelitian yg sudah ditentukan, (2) menyelidiki dokumen yg berkaitan menggunakan penekanan penelitian, (3) observasi dalam aktivitas subjek penelitian menggunakan mengamati taktik yg sudah dilaksanakan buat pengembangan KSPPS.

BAB III Tahap analisis atau Pengecekan dan inspeksi keabsahan data, aktivitas yg dilakukan pada termin ini merupakan mengadakan pengecekan data dalam subjek, informan atau dokumen buat pertanda validitas data yg diperoleh. Pada termin ini jua dilakukan pemugaran data baik berdasarkan segi bahasa juga sistematikanya sebagai akibatnya pada laporan output penelitian memperoleh

derajat agama yg sangat tinggi. Hal ini dilakukan menggunakan cara; (1) ketekunan pengamatan, (2) triangulasi (3) inspeksi seawat melalui diskusi, dan (4) kecukupan referensi



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh**

Pada pelaksanaan peraturan daerah Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan pemerintah Daerah Kota Banda Aceh perlu di putuskan Perwal mengenai Kedudukan Susunan, , Tupoksi, Kewenangan dan cara Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh;

Untuk mendeskripsikan apa yang ingin dicapai Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menetapkan visi sebagai berikut :

*“Mewujudkan Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sehat, Tangguh, Mandiri, Berkeadilan, dan bertumpu pada mekanisme Pasar yang Madani.”*

Dalam mewujudkan Visi, Misi tadi, maka Dinas Koperasi menetapkan misi yg akan dilaksanakan merupakan menjadi berikut :

1. Peningkatan kiprah Koperasi, UKM dan Perdagangan pada sistem ekonomi kemasyarakatan yg bertumpu pada prosedur pasar, berkeadilan, berbasis sdm yg produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mandiri.

2. Pemberdayaan Koperasi, UKM dan Perdagangan supaya lebih efektif, efisien dan berdaya saing untuk menaikkan pendapatan perekonomian rakyat yg madani.

Tujuan Stratejik adalah pembagian terstruktur mengenai atau pelaksanaan berdasarkan misi yg akan dicapai dan dapat dihasilkan pada jangka saat 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun kedepan. Dengan diformulasikan tujuan stratejik ini maka Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh bisa menggunakan apa saja dan mengetahui apa yg wajib dilaksanakan pada memenuhi tuntutan visinya.

Tujuannya akan mengarah pada perumusan target, kebijakan, acara dan aktivitas pada rangka penerapan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan bisa diletakkan kerangka prioritas buat memilih arah, guna pencapaian keberhasilan menjadi motifator dan pendorong bagi kinerja yg memuaskan pada penyelenggaraan swatantra daerah.

Adapun yang menjadi acuan Dinas Koperasi, UKM Kota Banda Aceh merupakan:

1. Peningkatan stabilitas dan profesionalisme dalam kinerja
2. Peningkatan kestabilan barang kebutuhan pokok dalam harga dan distribusinya
3. menumbuhkan dan mengembangkan Ekonomi Rakyat

Menindak lanjuti acuan aktivitas yg sudah diuraikan tadi diatas, maka target yg hendak dicapai merupakan menjadi berikut:

1. Terwujudnya efektif dan profesionalnya dalam aktivitas tempat kerja
2. Barang dan harga yg tersebar pada pasar terjaga kualitasnya
3. Sejumlah UKM yg sudah dibina dapat maju
4. Meningkatnya koperasi aktif

#### **4.1.1 Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**

##### **a. kepala dinas**

Tugas Kepala Dinas adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang Koperasi, UKM dan bidang Perdagangan yg adalah wewenang Kota dan tugas bantuan yang diberikan pada Kota.

Dalam pelaksanaan tugas yang telah disebutkan pada Pasal 10, Fungsi Kepala Dinas adalah melaksanakan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan acara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, aplikasi kebijakan, aplikasi penilaian dan pelaporan, aplikasi administrasi dinas pada bidang Koperasi, UKM dan bidang Perdagangan.

##### **b. Sekretaris**

Tugas Sekretariat adalah membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, tata usaha dan tata usaha, kearsipan, urusan umum, bahan dan peralatan, kebersihan, hukum, tata usaha dan memberikan dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Koperasi, Kecil dan Usaha Menengah dan Dinas Perdagangan.

Dalam pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. menyiapkan perumusan kebijakan operasional untuk tugas administrasi, mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengintegrasikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan koperasi. , Dinas koperasi UKM dan Perdagangan;
2. penyelenggaraan urusan tata usaha negara, keuangan, kepegawaian, tata usaha dan kepengurusan, kearsipan, umum, perlengkapan, tata graha, hukum; dan
3. mengawasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

C. (1) Tugas Bagian-bagian Program dan Pelaporan adalah:

- a. menghimpun dan menyiapkan dokumen buat penyusunan planning kerja, program, aturan, dan laporan pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

- b. melaksanakan aktivitas koordinasi dan konsultasi pada penyusunan planning kerja, program, aturan dan laporan pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. bab. penyusunan program, aturan dan laporan pada lingkungan Direktorat Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan aktivitas Divisi Program dan Laporan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yg diberikan sang pimpinan sinkron menggunakan bidang kerjanya.

(2) Tugas bagian Keuangan adalah :

- a. melakukan mengumpulkan dan penyiapan bahan keuangan pada lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi pada rangka aplikasi penatausahaan keuangan pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. melaksanakan penatausahaan keuangan pada lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
- d. melaksanakan aktivitas pembuktian dokumen keuangan sinkron peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun laporan keuangan pada Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;

(3) Tugas bagian Umum, Kepegawaian dan Aset adalah

- a. melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan rapikan usaha, tempat tinggal tangga, hubungan masyarakat, hukum, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset pada lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka membenahan usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, perlengkapan dan perlengkapan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. melakukan membenahan korporasi dan dalam negeri, kehumasan, hukum, perlengkapan dan kepegawaian, membenahan birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Divisi Umum, Personalia dan Aset; dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Bidang Koperasi**

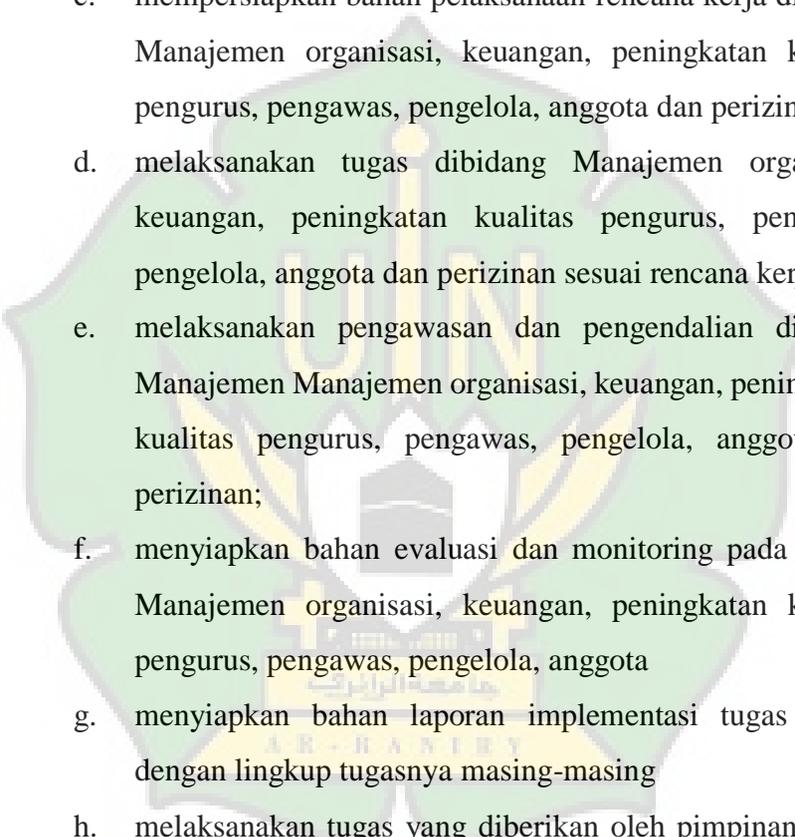
Tugas Bidang Koperasi adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan pada bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Koperasi memiliki fungsi :

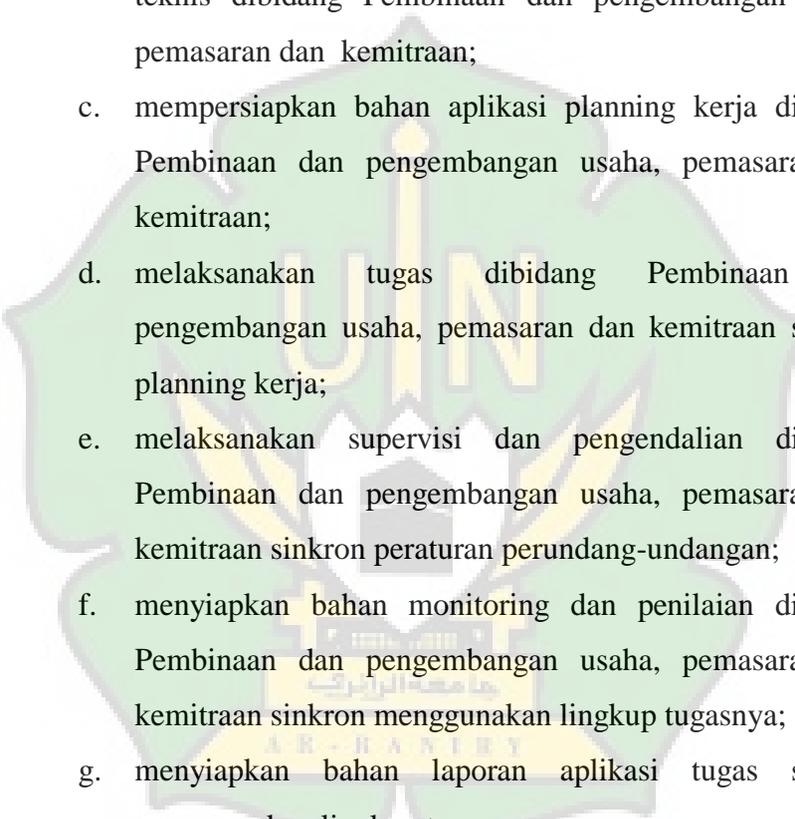
- A. mempersiapkan bahan susunan aktivitas kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, SDM dan perizinan;
- c. mempersiapkan bahan susunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, SDM dan perizinan sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, berdari daya manusia dan perizinan sesuai memakai lingkup tugasnya;
- e. implementasi kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, berdari daya manusia dan perizinan sesuai memakai lingkup tugasnya;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha koperasi, berdari daya manusia dan perizinan sesuai memakai lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yg diberikan sama pimpinan sesuai memakai bidang tugasnya.

(1) Seksi Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM dan Perizinan mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dibidang Manajemen organisasi, keuangan, peningkatan kualitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan perizinan;

- 
- b. mempersiapkan bahan petunjuk teknis dibidang Manajemen organisasi penyusunan kebijakan dan, keuangan, peningkatan kualitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan perizinan;
  - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang Manajemen organisasi, keuangan, peningkatan kualitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan perizinan;
  - d. melaksanakan tugas dibidang Manajemen organisasi, keuangan, peningkatan kualitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan perizinan sesuai rencana kerja;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang Manajemen Manajemen organisasi, keuangan, peningkatan kualitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota dan perizinan;
  - f. menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pada bidang Manajemen organisasi, keuangan, peningkatan kualitas pengurus, pengawas, pengelola, anggota
  - g. menyiapkan bahan laporan implementasi tugas sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing
  - h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

(2) Seksi Fasilitasi, Pemberdayaan Usaha Koperasi memiliki tugas :

- 
- a. mempersiapkan bahan penyusunan program kerja dibidang Pembinaan, pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan;
  - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan dan pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan;
  - c. mempersiapkan bahan aplikasi planning kerja dibidang Pembinaan dan pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan;
  - d. melaksanakan tugas dibidang Pembinaan dan pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan sinkron planning kerja;
  - e. melaksanakan supervisi dan pengendalian dibidang Pembinaan dan pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan sinkron peraturan perundang-undangan;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan penilaian dibidang Pembinaan dan pengembangan usaha, pemasaran dan kemitraan sinkron menggunakan lingkup tugasnya;
  - g. menyiapkan bahan laporan aplikasi tugas sinkron menggunakan lingkup tugasnya;
  - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sang pimpinan sinkron menggunakan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Usaha Simpan Pinjam memiliki tugas :

- A. menyiapkan bahan penyusunan planning kerja dibidang pelatihan supervisi dan inspeksi kelengkapan organisasi, manajemen keuangan bisnis simpan pinjam ;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelatihan supervisi dan inspeksi kelengkapan organisasi, manajemen keuangan, dan bisnis simpan pinjam;
- c. mempersiapkan bahan aplikasi planning kerja dibidang pelatihan supervisi dan inspeksi kelengkapan organisasi, manajemen keuangan dan bisnis simpan pinjam;
- d. melaksanakan tugas dibidang pelatihan supervisi dan inspeksi kelengkapan organisasi, manajemen keuangan dan bisnis simpan pinjam sinkron planning kerja;
- e. melaksanakan supervisi dan pengendalian dibidang pelatihan supervisi dan inspeksi kelengkapan organisasi, manajemen keuangan dan bisnis simpan pinjam sinkron peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan penilaian dibidang pelatihan supervisi dan inspeksi kelengkapan organisasi, manajemen keuangan dan bisnis simpan pinjam sinkron menggunakan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan aplikasi tugas sinkron menggunakan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sang pimpinan sinkron menggunakan bidang tugasnya

#### **D. Bidang Pemberdayaan**

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan UKM ;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan UKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan UKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan UKM sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, pengembangan dan

pemberdayaan kelembagaan UKM sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Pendataan dan Kemitraan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pendataan usaha mikro dan fasilitasi kemitraan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pendataan usaha mikro dan fasilitasi kemitraan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pendataan usaha mikro dan fasilitasi kemitraan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pendataan usaha mikro dan fasilitasi kemitraan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pendataan usaha mikro dan fasilitasi kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pendataan usaha mikro dan fasilitasi kemitraan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sumber daya manusia, manajemen dan perizinan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sumber daya manusia, manajemen dan perizinan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sumber daya manusia, manajemen dan perizinan;
- d. melaksanakan tugas dibidang sumber daya manusia, manajemen dan perizinan rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sumber daya manusia, manajemen dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sumber daya manusia, manajemen dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan kualitas, promosi dan pemasaran;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan dan pengembangan kualitas, promosi dan pemasaran;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan dan pengembangan kualitas, promosi dan pemasaran;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengembangan kualitas, promosi dan pemasaran sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan dan pengembangan kualitas, promosi dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengembangan kualitas, promosi dan pemasaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **E. Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran

dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pencitraan produk, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan, peredaran barang dan jasa, sarana distribusi, stabilisasi barang pokok dan penting dan tempat penyimpanan, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pameran

dan misi dagang, perizinan dan pendaftaran perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, perizinan, sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, perizinan, sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, perizinan, sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, perizinan, sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, perizinan , sarana dan prasarana distribusi perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, perizinan dan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Persediaan Barang Pokok, Stabilisasi Harga dan Pengawasan Barang Bersubsidi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang ketersediaan, harga dan stabilisasi barang pokok dan penting lainnya, pengawasan, pengadaan dan penyaluran;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang ketersediaan, harga dan stabilisasi barang pokok dan penting lainnya, pengawasan, pengadaan dan penyaluran;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang ketersediaan, harga dan stabilisasi barang pokok dan penting lainnya, pengawasan, pengadaan dan penyaluran;
- d. melaksanakan tugas dibidang ketersediaan, harga dan stabilisasi barang pokok dan penting lainnya, pengawasan, pengadaan dan penyaluran sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang ketersediaan, harga dan stabilisasi barang pokok dan penting lainnya, pengawasan, pengadaan dan penyaluran sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang ketersediaan, harga dan stabilisasi barang pokok dan penting lainnya, pengawasan, pengadaan dan penyaluran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

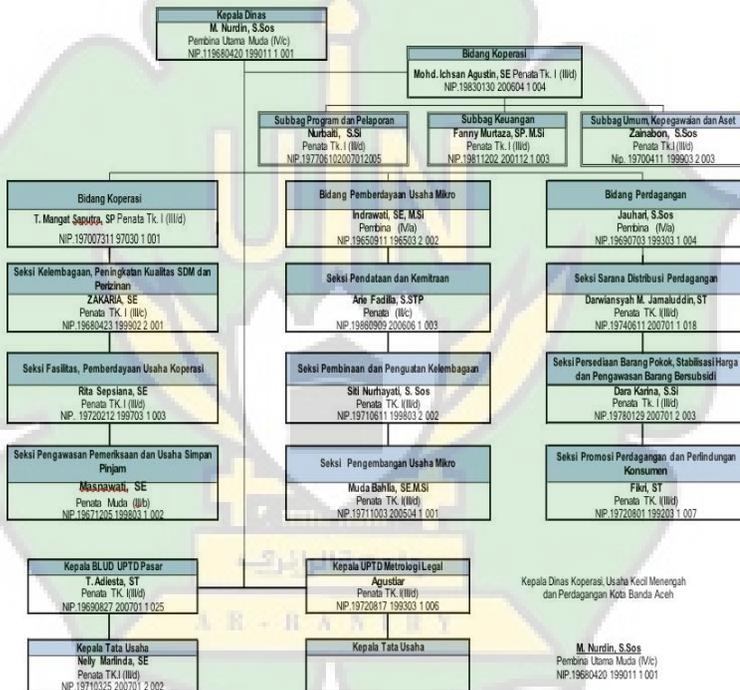
(3) Seksi Promosi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan peredaran barang dan jasa, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pencitraan produk, pameran dan misi dagang;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan peredaran barang dan jasa, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pencitraan produk, pameran dan misi dagang;

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pembinaan, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan peredaran barang dan jasa, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pencitraan produk, pameran dan misi dagang;
- d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan peredaran barang dan jasa, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pencitraan produk, pameran dan misi dagang sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pembinaan, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan peredaran barang dan jasa, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pencitraan produk, pameran dan misi dagang sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan, tera dan tera ulang, pengawasan dan pemeriksaan peredaran barang dan jasa, penegakan hukum dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, promosi, pencitraan produk, pameran dan misi dagang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh**



## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Perencanaan dan Pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh**

Perencanaan adalah sebuah proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi UKM kota Banda Aceh tentang perencanaan dan pelaksanaan adalah sebagai berikut:

*Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan tidak secara spesifik membahas KSPPS tetapi koperasi secara umum dan UKM. Dinas Koperasi UKM sedang mengarahkan kepada koperasi-koperasi khusus yang ada di kota Banda Aceh untuk segera beralih ke Syariah, Sesuai dengan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2018 yaitu tentang Lembaga Keuangan Syariah dan juga sesuai dengan kelembagaannya bahwa rencana sesuai dengan Perwal No. 11 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh perencanaan berawal dari visi, misi, dan tujuan.*

Menurut Perwal nomor 11 tahun 2016 pasal 2 kedudukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh Bidang Koperasi adalah sebagai berikut:

Tugas bidang Koperasi adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dibidang Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan susunan kegiatan kerja dan planning kerja bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, bisnis koperasi, sumber daya insan dan perizinan;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, bisnis koperasi, asal daya insan dan perizinan sinkron menggunakan lingkup tugasnya;
- c. menyiapkan bahan pelaksanan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, bisnis koperasi, SDM dan perizinan sesuai bidangnya;
- d. melaksanakan kebijakan bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, bisnis koperasi, SDM dan perizinan sinkron menggunakan lingkup tugasnya;
- e. aplikasi monitoring, penilaian dan pelaporan pada bidang Pembinaan dan pengembangan kelembagaan, bisnis koperasi,

asal daya insan dan perizinan sinkron menggunakan lingkup tugasnya;

- f. aplikasi tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan sama pemimpin sinkron menggunakan bidang tugasnya

Perencanaan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh adalah sesuai dengan peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh.

Perencanaan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh adalah berawal dari visi, misi, dan tujuan. Visi dan misi adalah gambaran tentang apa yang ingin dicapai serta bagaimana tindakan untuk mencapainya oleh Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh.

“Mewujudkan Koperasi, UKM dan Perdagangan yang sehat, Tangguh, Mandiri, Berkeadilan, dan bertumpu pada mekanisme Pasar yang Madani”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh, yaitu:

1. Peningkatan kiprah Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan pada sistem ekonomi kemasyarakatan yang bertumpu dalam prosedur pasar, berkeadilan, berbasis SDM yang produktif, mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan mandiri.
2. pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan supaya lebih efektif, efisien dan berdaya saing

untuk meninggikan pendapatan perekonomian warga yang madani.

Strategi yang dijalankan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan Koperasi yaitu seperti hasil wawancara berikut:

*Memberikan pelatihan kepada koperasi-koperasi yang ada di Banda Aceh agar mampu ditingkatkan dan berjalan dengan baik dan entitas koperasi semakin bagus dalam segala hal, baik dalam pelayanan anggota, dalam tugas dan kewajibannya sebagai koperasi melaksanakan RAT, memberikan laporan secara rutin kepada Dinas Koperasi, dan mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Seperti keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pemberian SHU yang seimbang, pendidikan kerjasama antar koperasi bila mengacu pada aturan tugas tugas kita sebagai dinas adalah bagaimana koperasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi syariah.*

Adapun pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan oleh Dinas koperasi UKM dan Perdagangan yaitu:

1. Pelatihan Kewirausahaan dan pemasaran, diikuti oleh 50 orang pelaku UKM/Anggota Koperasi, pada tanggal 6 s/d 8 April 2021, bertempat di Grand Permata Hati

2. Pelatihan Dasar Perkoperasian, diikuti oleh 50 orang pengurus koperasi, pada tanggal 23 s/d 25 Agustus 2021, bertempat di The Pade Hotel
3. Pelatihan Sistim Akuntansi Koperasi, diikuti oleh 50 orang pengurus koperasi, pada minggu ke 2 Oktober 2021 bertempat di Kryad Muraya Hotel
4. Pelatihan Koperasi Syariah, diikuti oleh 50 orang pengurus Koperasi, pada minggu ke 3 Oktober 2021 bertempat di Kryad Muraya Hotel 2021

Kedua upaya yang dilakukan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kualitas koperasi yaitu seperti pemaparan berikut:

*Kualitas terbagi menjadi dua hal yaitu lembaga, dan keuangan. Bagaimana koperasi disebut berkualitas salah satu jika kedua hal tersebut berkualitas bagus. Di bidang kelembagaan koperasi yaitu koperasi berjalan sesuai dengan aturan yang ada melaksanakan RAT kemudian administrasi yang lengkap mengenai keanggotaan dan pengurusan SOP, kemudian SOM, jadi secara kelembagaan berkualitas. Kemudian masalah kualitas keuangan, jika koperasi berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, apakah mungkin dia sudah melaporkan laporan keuangannya kepada dinas secara terus menerus, apakah*

*dalam pelaporan keuangan sudah mengacu pada prinsip laporan keuangan yang sekarang mengacu pada SAK ETAP.*

Dinas Koperasi UKM dari perumusan visi dan misi di atas adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh berdasarkan hasil wawancara dengan staf adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dan profesionalisme kerja dengan cara terlaksananya kegiatan kantor yang efektif dan professional yaitu lancarnya pelayanan administrasi perkantoran dan didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana kantor dan tersedianya baju pegawai
2. memberdayakan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan agar lebih efisien dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat yang madani yaitu dengan menjaga kualitas barang dan harga yang beredar dipasar, meningkatnya jumlah UKM yang mendapat bantuan perbankan dan meningkatnya koperasi aktif

### **Rencana dan program Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan**

Adapun Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam pengembangan KSPPS Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan pengawasan kekuatan, Kesehatan, kemandirian serta akuntabilitas koperasi,
2. Pelatihan kewirausahaan dan pemasaran

3. Pelatihan dasar perkoperasian bagi anggota koperasi
4. Pelatihan pola Syariah bagi pengurus dan anggota koperasi
5. Pelatihan laporan keuangan koperasi bagi pengurus dan juru buku koperasi
6. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi
7. Kegiatan pelaksanaan penilaian Kesehatan koperasi

Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2016 tentang TUPOKSI Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Kemudian perencanaan Dinas Koperasi UKM dalam pengembangan KSPPS berawal dari visi, misi, dan tujuan. Selain itu Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh juga memiliki program dan kegiatan untuk mengembangkan koperasi dan UKM.

**Tabel 4.1 Hasil Observasi Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**

Pernyataan	Hasil Observasi	
	Ya	Tidak
Merencanakan pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program kerja untuk mencapai tujuan.	Ya	-

Visi dan misi menggambarkan apa yang ingin dicapai di masa depan	Ya	-
Tujuan dari perumusan visi dan misi telah sesuai	Ya	-
Sasaran yang dicapai dari perumusan visi, misi, dan tujuan telah sesuai	Ya	-
Program dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai untuk mencapai visi dan misi	Ya	-

*Sumber : Hasil Observasi Perencanaan Dinas Koperasi UKM dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Banda Aceh*

Hasil observasi pada tanggal 01 Desember 2021 berkesimpulan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Dilihat dari perumusan organisasi yang dibuat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, serta diwujudkan kembali melalui program dan kegiatan kerja Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian mulai dari observasi,

wawancara, dan studi dokumen perencanaan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh telah sesuai dan berjalan dengan baik.

### **Alokasi Sumber daya Manusia**

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pelaksanaan pengembangan KSPPS Syariah di bagi menjadi beberapa bidang. Strategi pengembangan dan pemberdayaan KSPPS Syariah dari hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi UKM yaitu sebagai berikut:

Strategi pengembangan dan pemberdayaan KSPSS akan melaksanakan sesuai dengan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Bidang kelembagaan membina masalah kelembagaan dan organisasinya, masalah buku-buku, administrasinya, dan RAT, serta peraturan baru mengenai perkoperasian. Bidang pengawasan melaksanakan pengawasan/mengawasi koperasi sesuai dengan pola syariah, sesuai dengan peraturan yang ada, dan melenceng atau tidak. Bidang bina usaha lebih kepada usaha non keuangan atau sektor riil adalah bina usaha yang melakukan pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas strategi pengembangan dan pemberdayaan KSPPS adalah sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh seperti bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan bidang bina usaha akan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## 1. Bidang kelembagaan

Pelaksanaan pengembangan KSPPS bidang kelembagaan berperan untuk menangani tentang Koperasi mengenai permasalahan perizinan koperasi, penyuluhan dan SDM. Berikut hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi UKM :

*Pelaksanaan mengacu pada judul pengembangan KSPPS. Berkaitan dengan itu pemerintah menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar bisa tumbuh menjadi kuat, sehat, tangguh, dan mandiri. Untuk di Banda Aceh apabila punya keanggotaan di dalam suatu kota, pemerintah Dinas Koperasi UKM salah satu pengembangannya yaitu menerbitkan izin usaha. Jadi kalau ada koperasi yang membutuhkan izin usaha akan diberikan izin usaha dan memberikan pedoman pengelolaan kegiatan usaha KSPPS serta melakukan pengawasan dan pengembangannya.*

Berdasarkan pemaparan di atas pelaksanaan Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengembangan KSPPS yaitu dengan memberikan izin usaha bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan izin usaha. Serta juga melakukan pengawasan dan pengembangan bagi KSPPS. Dinas Koperasi UKM juga memberikan bimbingan, bimbingan di sini adalah berupa pemberdayaan dan pengembangan KSPPS, selain itu juga melakukan penilaian kesehatan bagi KSPPS.

## 2. Bidang Pengawasan

Pelaksanaan pengembangan KSPPS Syariah bidang pengawasan berperan untuk menangani tentang Koperasi mengenai pengawasan dan kepatuhan koperasi, melakukan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi.

Berikut hasil wawancara dengan staf Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh:

*Dinas Koperasi juga memberikan bimbingan disini adalah berupa bimbingan pemberdayaan dan pengembangan KSPPS. Selain itu juga melakukan penilaian kesehatan KSPPS.*

### 3. Bidang Fasilitas dan Pemberdayaan Koperasi

Pelaksanaan pengembangan KSPPS Syariah bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi berperan untuk menangani tentang koperasi mengenai usaha koperasi, pembiayaan dan permodalan koperasi, serta pemasaran dan kemitraan usaha koperasi.

Bentuk Fasilitas dan pemberdayaan KSPPS Syariah yaitu seperti penjelasan di bawah ini:

*Mengadakan semacam pelatihan, diklat, bimtek, dsb.. Dinas koperasi juga terbuka untuk melakukan konsultasi atau pendampingan usaha. Jadi disini ada pusat konsultasi yang siap menerima konsultasi dari gerakan koperasi UKM .*

*Tidak berhenti disitu, tetapi terus menerus melakukan upaya pengembangan koperasi.*

### **Motivasi KSPPS Syariah**

Motivasi atau apresiasi yang diberikan untuk KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

*Ada apresiasi koperasi, di dalam apresiasi koperasi dilakukan suatu penilaian koperasi berprestasi itu agenda setiap tahun. Jadi nanti ada tim yang melakukan penilaian terhadap koperasi yang dianggap berprestasi dan itu muncul semacam penghargaan dan juga apresiasi diberikan setelah mendapatkan penghargaan. Diikuti lomba koperasi berprestasi di tingkat provinsi atau ditingkat nasional.*

Berdasarkan pemaparan di atas apresiasi dan motivasi yang diberikan oleh Dinas Koperasi UKM adalah berupa penghargaan kepada koperasi yang laporan keuangannya tertib dan RAT tepat waktu. Kemudian mengikutkan KSPPS Syariah untuk mengikuti lomba baik ditingkat provinsi maupun nasional. Dengan adanya apresiasi dan motivasi maka KSPPS akan semangat untuk mengembangkan koperasinya.

**Tabel 4.2 Hasil Observasi Pelaksanaan Dinas Koperasi dan Perdagangan**

Pernyataan	Hasil Observasi	
	Ya	Tidak
Mengimplementasikan perencanaan yang telah dirumuskan dengan baik	Ya	-
Mengalokasikan Sumber Daya Manusia ke dalam beberapa bagian untuk memaksimalkan kinerja telah sesuai	Ya	-
Bidang kelembagaan telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Ya	-
Bidang pengawasan telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Ya	-
Bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi telah melaksanakan tugasnya dengan baik	Ya	-
Memberikan motivasi dan apresiasi kepada KSPPS untuk meningkatkan	Ya	-

kinerjanya telah berjalan dengan baik		
---------------------------------------	--	--

Sumber : Hasil Observasi Pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dalam Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Banda Aceh

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh telah berjalan dengan baik. Berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumen menunjukkan bahwa mulai dari pengalokasian atau pembagian staf atau karyawan ke beberapa bidang dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian juga memberikan motivasi dan apresiasi supaya KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh termotivasi dan mampu lebih mengembangkan lembaganya lagi. Pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dalam pengembangan KSPPS Syariah dari hasil penelitian telah berjalan baik dan sesuai.

#### **4.2.2 Evaluasi Strategi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam Pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh**

Evaluasi strategi adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja. Berikut evaluasi menurut Staff Dinas Koperasi dalam Pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

*Tiap akhir kegiatan ada semacam evaluasi kinerja yang mana evaluasi kinerja itu untuk menilai apakah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan melenceng dari pelaksanaannya atau pelaksanaan melenceng dari perencanaan. Sementara ini perencanaan dan pelaksanaan sama karena dalam melaksanakan harus sesuai dengan rencana. Kendalanya keterbatasan dana, keterbatasan situasi, kondisi lapangan. Jika ada kendala maka akan diperbaiki pada tahun berikutnya. Di dalam sebuah lembaga itu ada laporan kinerja instansi*

Berikut penjelasan Ibu Rita tentang evaluasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dalam pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh

*Pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan aturan dan program dinas. Kita melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Di akhir kita ada monitoring, apakah yang dilakukan sudah sesuai sasaran atau dampak kita melakukan kegiatan itu seperti apa*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaannya selama ini sudah sesuai dengan perencanaan, aturan, dan program Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Misal terjadi suatu kendala maka akan diperbaiki pada tahun berikutnya.

Setelah melakukan tindakan evaluasi maka diperlukan tindakan perbaikan dari kekurangan yang sebelumnya. Penjelasan tindakan perbaikan dari wawancara dengan staf Dinas Koperasi UKM yaitu sebagai berikut:

*Total KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh ada 507 koperasi. Sedangkan dari total 507 KSPPS Syariah terdapat 121 yang tidak aktif. Berikut penjelasan tentang KSPPS Syariah yang tidak aktif:*

*Tidak aktif KSPPS ada 2 faktor, pertama organisasi dikelola oleh orang-orang yang berkapasitas atau tidak, anggota sebagai pemilik rata-rata tidak tahu tentang visi misi koperasi hanya ikut-ikutan, tidak komitmen anggota dan pengelola koperasi, serta koperasi sudah tidak ada kegiatan. Kedua SDM pengelola koperasi tidak mempunyai kapasitas dan tidak komitmen anggota dan pengelola koperasi. Dari kedua faktor tersebut dapat dibuktikan dengan Tidak adanya RAT*

Berdasarkan pemaparan di atas ketidak aktifan KSPPS Syariah bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu organisasi dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, ketidaktahuan anggota tentang visi dan misi koperasi hanya ikut-ikutan, tidak ada komitmen antara pengelola dan anggota koperasi, dan tidak adanya kegiatan dalam koperasi. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan ketidak aktifan 121 KSPPS di Kota Banda Aceh

Tindakan perbaikan dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk KSPPS Syariah yang tidak aktif adalah:

*Tindakannya yaitu di data tidak melaporkan kegiatan berupa RAT selama 2 tahun. Kemudian ditanya ini mau dilanjut apa dibubarkan. Kesepakatan antara pengurus dan anggota ini mau diperbaiki atau dibubarkan. Pembubaran juga bisa dilakukan sendiri melalui rapat kemudian melaporkan hasil berita acara kepada badan hukum pemerintah setempat yakni Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa jika masih dapat dibina akan dibina kalau sudah tidak bisa dibubarkan.*

Berdasarkan wawancara di atas tindakan perbaikan untuk KSPPS Syariah yang tidak aktif adalah di data tentang RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang tidak dilakukan selama 2 tahun berturut-turut oleh koperasi. Kemudian Dinas Koperasi dan UKM menanyakan kepada pengurus atau pengelola koperasi tentang kelanjutannya apa mau lanjut atau bubar. Pembubaran bisa dilakukan sendiri oleh koperasi dengan melakukan rapat antara pengurus dan anggota, kemudian melaporkan hasil berita acara kepada Dinas Koperasi UKM

**Tabel 4.3 Hasil Observasi Evaluasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan**

Pernyataan	Hasil Observasi
------------	-----------------

	Ya	Tidak
Evaluasi Strategi Dinas Koperasi dan UKM dalam pengembangan KSPPS sudah berjalan baik	Ya	-
Pencapaian misi berjalan sesuai target yang telah direncanakan	Ya	-
Pencapaian misi berbunyi “Meningkatkan peran Koperasi” berjalan sesuai target yang telah direncanakan	Ya	-
Pencapaian misi berbunyi “Memberdayakan Koperasi agar lebih efisien dan berdaya saing” berjalan sesuai target yang telah direncanakan	Ya	-
Pengetahuan pengurus KSPPS tentang syariah bagus	Ya	-
KSPPS 100% menggunakan prinsip dan aturan syariah	-	Tidak

Hasil observasi menunjukkan bahwa KSPPS di Kota Banda Aceh berjalan bagus dalam pencapaian misi yang diimpikan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Banda Aceh. Namun perkembangan bagus tersebut rata-rata dari segi kuantitas dan dari segi kualitas masih kurang dan memerlukan perbaikan kembali.

### **4.2.3 Analisis SWOT**

Analisis SWOT Dinas Koperasi UKM dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh. Analisis SWOT dilakukan untuk melakukan evaluasi dari segi faktor internal dan faktor eksternal KSPPS Syariah Kota Banda Aceh, serta bagaimana Dinas Koperasi UKM mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di KSPPS.

Faktor internal KSPPS di Kota Banda Aceh yaitu:

Para Pengurus masih sangat minim pemahamannya tentang Syariah, lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil, dan kekurangannya sistem bagi hasilnya masih semi atau belum murni masih menggunakan pola konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor internal yang dimiliki KSPPS di Kota Banda Aceh adalah KSPPS lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil lebih menguntungkan karena menggunakan profit dan loss sharing. Artinya keuntungan dan kerugian dibagi sama dengan anggota, ini relatif lebih adil, tapi kekurangannya sistem bagi hasilnya masih semi atau belum murni syariah.

Faktor eksternal KSPPS di Kota Banda Aceh yaitu :

Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi dan keberadaan koperasi khususnya tentang koperasi syariah sebagai badan usaha yang memiliki kelembagaan dan ciri khas/jati diri

dibanding dengan usaha yang lain, selain itu pemilik dan pengguna koperasi adalah anggota, dan masih banyak masyarakat yang melakukan pinjaman ke bank atau online diperlukannya sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang koperasi

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor eksternal yang dimiliki KSPPS di Kota Banda Aceh adalah keuntungannya pemilik koperasi adalah anggota dari koperasi itu sendiri. Kelemahannya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan koperasi syariah dan masyarakat masih banyak yang melakukan pinjaman ke bank atau online, diperlukannya sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang koperasi Syariah dan juga masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan koperasi syariah

Faktor kekuatan internal yang dimiliki KSPPS di Kota Banda Aceh

Karena koperasi melayani anggota lebih mudah persyaratannya tidak serumit dibandingkan pinjam di perbankan; di koperasi anggota yang pinjam mendapat SHU; kelebihan koperasi adalah anggota juga sebagai pemilik koperasi, juga sebagai anggota, dan pengguna; lebih mendapatkan tempat yang tepat dengan menggunakan sistem syariah; dan bagi hasil lebih menguntungkan karena menggunakan profit and loss sharing artinya keuntungan dan kerugian dibagi sama dengan anggota relatif lebih adil

Faktor kelemahan internal yang dimiliki KSPPS di Kota Banda Aceh

Biaya equivalent rate lebih mahal dan dalam pelaksanaannya sulit untuk menerapkan profit and loss sharing artinya koperasi yang berpola syariah yang memberikan pinjaman kepada anggotanya tidak bisa secara detail bisa mengawasi secara langsung usaha dari peminjam.

Faktor peluang eksternal yang dimiliki KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh

Masyarakat Kota Banda Aceh yang mayoritas muslim menjadi lebih tertarik dengan pola syariah dan pola syariah biasanya terkait dengan organisasi masyarakat bersifat keagamaan jadi secara jaringan memiliki peluang besar

Faktor ancaman eksternal yang dimiliki KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh

Perhitungan equivalent rate tidak lebih murah dibandingkan konvensional sedangkan masyarakat kebanyakan memilih yang lebih murah kemudian kebanyakan masyarakat banyak yang tidak memperdulikan mana yang syariah mana yang konvensional tapi mana yang lebih murah dan cepat pasti diambil.

**Tabel 4.4 Analisis SWOT**

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSPPS Syariah lebih menarik karena menggunakan sistem bagi hasil</li> <li>2. Dengan memilih KSPPS lebih mendapatkan tempat yang tepat karena menggunakan sistem syariah</li> <li>3. Bagi hasil lebih menguntungkan dan adil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman pengurus masih minim tentang Syariah</li> <li>2. Sistem bagi hasil masih semi/belum murni masih menggunakan pola konvensional</li> <li>3. Dalam pelaksanaannya sulit untuk menerapkan profit and loss sharing</li> </ol>
Faktor Eksternal		

Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
<p>1. Masyarakat Banda Aceh yang mayoritas muslim menjadi lebih tertarik dengan pola Syariah</p> <p>2. Secara jaringan memiliki peluang besar dengan memanfaatkan organisasi masyarakat bersifat keagamaan</p>	<p>1. Memanfaatkan keberdaan organisasi keagamaan untuk kemajuan KSPPS Syariah</p> <p>2. Mengembangkan pola pembinaan KSPPS dalam SDM, financial, teknologi, dan manajemen kearah pemanfaatan peluang yang dimiliki</p> <p>3. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemberdayaan KSPPS</p>	<p>1. Meningkatkan SDM KSPPS melalui, pendidikan, bimtek, dan pelatihan yang terarah dan berkesinambungan.</p> <p>2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan KSPPS</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama dengan pengelola KSPPS</p>

Tantangan (T)	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Pemahaman masyarakat tentang KSPPS masih kurang</p> <p>2. Ketidakterperdulian masyarakat tentang koperasi syariah dan konvensional</p> <p>3. Perhitungan equivalent rate tidak lebih murah dibandingkan konvensional, sedangkan masyarakat cenderung memilih yang lebih murah</p>	<p>1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan KSPPS dengan pendekatan secara langsung maupun tidak langsung</p> <p>2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta</p> <p>3. Equivalent rate yang tinggi dengan menurunkan equivalent rate</p>	<p>1. Meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan KSPPS kepada masyarakat agar terjalin Kerjasama</p> <p>2. Menghimbau kepada KSPPS untuk melakukan pelayanan yang bagus dan cepat</p> <p>3. Meningkatkan kompetensi SDM KSPPS untuk menghadapi globalisasi dengan mengadakan bimtek ataupun pelatihan</p>

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada sejumlah pihak terkait tentang Pengembangan KSPPS di Kota Banda Aceh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada pengembangan KSPPS merupakan melalui visi, misi, tujuan, dan target yang adalah rancangan jangka panjang menjadi hasrat yang akan diwujudkan ke depannya. Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan tujuan tadi diwujudkan pada acara-acara dan aktivitas Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2. Pelaksanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah merupakan menggunakan melakukan pelatihan, evaluasi dan supervisi buat KSPPS Syariah. Dalam melakukan aplikasi pengembangan Dinas Koperasi UKM mengalokasikan asal daya insan sebagai 3 bidang yaitu: bidang kelembagaan, bidang supervisi, dan bidang pemberdayaan dan proteksi koperasi. Dinas Koperasi jua menaruh motivasi dan apresiasi bagi KSPPS Syariah yg berprestasi menggunakan mengikut sertakan dalam lomba baik taraf provinsi juga nasional. Memberikan apresiasi jua bagi

koperasi-koperasi yg tertib pada melaporkan laporan keuangan dan melaksanakan RAT. Dengan adanya apresiasi bagi KSPPS Syariah maka akan muncul rasa semangat bagi koperasi tadi buat lebih menyebarkan usahanya.

3. Evaluasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada pengembangan KSPPS Syariah merupakan secara holistik mempunyai perkembangan yg relatif bagus. Dinas Koperasi sebatas melakukan pelatihan dan supervisi supaya KSPPS Syariah berjalan sinkron menggunakan anggaran-anggaran dan prinsip koperasi syariah. Pertarungan ketiga merupakan minimnya pengetahuan pengurus mengenai KSPPS Syariah. Minimnya pengetahuan pengurus mengenai koperasi berpola syariah ini diharapkan pengenalan supaya KSPPS Syariah bisa lebih berkembang lagi ke depannya

## **5.2 Saran**

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh menjadi galat satu forum pemerintah pada bidang ekonomi sudah sinkron konsep-konsep yg terdapat yaitu menaikkan kiprah koperasi. Berdasarkan output analisis terhadap taktik Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada pengembangan KSPPS Syariah bisa disarankan beberapa hal menjadi berikut:

1. Bagi pihak akademis perguruan tinggi dibutuhkan bisa sebagai dokumen akademik yg bermanfaat buat dijadikan acuan bagi sivitas akademika UIN Ar-raniry
2. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh dibutuhkan bisa terus membuat KSPPS Syariah, menggunakan cara mengadakan pengenalan yg lebih luas lagi, sebagai akibatnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sah-h sah bisa menaruh manfaat yg lebih akbar pada para pelaku khususnya KSPPS Syariah pada Kota Banda Aceh.
3. KSPPS Syariah, pengetahuan yg terbatas bagi pendiri dan pengurus pada menjalankan dan membuat usahanya, maka peneliti menyarankan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan buat selalu menaruh pembinaan dan bimbingan secara merata pada pengelola Koperasi Syariah, BMT, dan BTM. Hal ini dilakukan supaya mereka 507 koperasi menerima pengetahuan yg lebih tentang global bisnis guna membuat bisnis yg sudah atau mereka kelola.
4. Bagi peneliti selanjutnya, output penelitian ini dibutuhkan bisa dipakai menjadi bahan buat menambah pengetahuan dan wawasan terutama yg berkaitan pada taktik pengembangan KSPPS Syariah, sebagai akibatnya penelitian bisa lebih sempurna lebih sempurna

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantage*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Davis, P. (2010). *Mengembangkan Keunggulan Koperasi. Terjemahan Djabaruddin Djohan*.
- Dewi, V. S. (2016). *KINERJA, KESEJAHTERAAN ANGGOTA, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI (Studi kasus pada Koperasi “Aktif” dan “Tidak Aktif” di Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Gunawan, I. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. cet. ke-3. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendrojogi. 2015. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen,(2003). *Manajemen Strategis*.
- <https://bandaacehjournals.com/post/pemko-banda-aceh-siap-mensyariahkan-koperasi-di-banda-aceh>
- Ilmi, Wungu Amali. 2017. *Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi dalam Pembinaan Koperasi di Kota Serang*. Serang: Skripsi tidak diterbitkan.
- Ismanto, K. (2009). *Manajemen syari'ah: implementasi TQM dalam lembaga keuangan syariah*. Pustaka Pelajar.
- Joewono, Handito. (2012). *Strategy Management*. Jakarta: Arrbey

Jumlah koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223, dalam [goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/](http://goukm.id/jumlah-koperasi-syariah-di-indonesia-mencapai-150-223/), di akses pada Senin 06 November 2017 Pukul 19:00

Kotler, P., dan Keller, K. L. (2009). Alih Bahasa: Benyamin Molan. Manajemen Pemasaran. Edisi Ketigabelas. Jilid 1. *Cetakan Keempat. PT. Indeks. Jakarta.*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Rangkuti, Freddy. 2015. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Susanto, B. (2012). *Koperasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*. UIN-Maliki Press.

Surepi, L., Rahmat, A., dan Julita, R. (2021). Peranan Administrasi Bisnis Dalam Strategi Pengembangan Usaha. *JURNAL AGHNIYA*, 4(1), 1-10.

Taufiqurokhman, M. M. S. (2016). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, dalam <http://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id/organisasi/tupoksi/>

## **Lampiran 1 : Daftar Pedoman Wawancara**

### **PERTANYAAN MENGENAI PERENCANAAN**

1. Bagaimana perencanaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan KSPPS syariah di Kota Banda Aceh?
2. Apa Visi, Misi dan Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan KSPPS syariah di Kota Banda Aceh?
3. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kinerja usaha KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?
4. Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitas koperasi ?
5. Bagaimana program dan kegiatan dalam perencanaannya?

### **PERTANYAAN MENGENAI PELAKSANAAN**

1. Bagaimana pelaksanaan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?

### **PERTANYAAN MENGENAI EVALUASI**

1. Bagaimana evaluasi Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?

2. Bagaimana Tindakan Perbaikan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana Analisis SWOT Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pengembangan KSPPS Syariah di Kota Banda Aceh?



## Lampiran 2 Surat Keputusan Pembimbing

  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor 148/Uin.08/FEB/PP.00.9108/2021  
**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Kesatu : Menunjuk Saudara :  
a. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Sebagai Pembimbing I  
b. Jalaluddin, ST., MA. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Muhammad Rizki  
N I M : 170602210  
J u d u l : Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Aceh dalam Pengembangan Koperasi Syariah di kota Banda Aceh

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Agustus 2021  
D e k a n,  
  
Zaki Fuad

Tembusan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;  
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;  
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

AR - R A N I R Y

Dipindai dengan CamScanner

### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian





